

Analisis ketimpangan wilayah

Mohammad Irkham

Pusdiklat BPS RI Jl. Raya Jagakarsa No. 70 Lenteng Agung, Jakarta 12620,
Email: irkhammadjid@gmail.com

Abstrak

Tulisan ini bertujuan menganalisa ketimpangan pendapatan Provinsi Banten yang merupakan daerah hasil pemekaran. Penulisan ini menggunakan data sekunder tahun 2010-2016 yang berasal dari publikasi BPS Provinsi Banten. Analisis ketimpangan pendapatan antar wilayah menggunakan tipologi Klassen, indeks Williamson, indeks entropi Theil. Penelitian ini menunjukkan bahwa dari 8 kabupaten/kota di Banten terdapat empat daerah relatif tertinggal (semua kabupaten), satu daerah maju (Kota Cilegon), satu daerah cepat maju dan tumbuh (Kota Tangerang) dan dua daerah berkembang cepat (Kota Serang dan Kota Tangerang Selatan). Ketimpangan pendapatan Provinsi Banten sangat tinggi dengan indeks Williamson 0,77 dan indeks Theil sebesar 12,34. Penelitian ini menyarankan Pemerintah daerah Provinsi Banten untuk memperhatikan sumber-sumber daya yang masing-masing berada di kabupaten/kota Banten dan meningkatkan SDM.

Kata Kunci: Pertumbuhan ekonomi; ketimpangan pendapatan; klassen; indeks entropi theil

Analysis of regional inequality

Abstract

This study aims to analyze economic growth and income inequality among regions in Banten Province as result decentralization. The income inequality is measured by GRDP per capita and economic growth. This research uses Klassen Typology, Williamson Index, and Theil Entropy Index to analyze GRDP per capita data and economic growth during 2010-2016 at Banten Province. The results showed that municipality areas (Tangerang, South Tangerang, Cilegon, and Serang) are classified as advanced regions with high economic growth, while the regency areas (Pandeglang, Serang, Lebak, and Tangerang regencies) had relatively lagged behind but low inequality. In addition, the regional inequality in Banten Province is getting higher. This is shown from the Williamson Index of 0.7 and Theil's Entropy index of 9.41 which is very high. Based on the findings, the paper suggests to the central and local governments to create policies that encourage economic growth as well as economic equity. The encouragement of economic equity can be done by encouraging economic growth in the area of relatively lag behind, particularly the regency area.

Keywords: *Economic growth; inequality income; klassen; theil entropy index*

PENDAHULUAN

Ketimpangan pendapatan antar wilayah dan pembangunan ekonomi merupakan permasalahan yang dimiliki oleh Provinsi Banten (Pemda Provinsi Banten, 2012). Provinsi Banten merupakan daerah pemekaran berdasarkan UU No.23 Tahun 2000. UU No. 23 Tahun 2000 merupakan dampak reformasi yang mendorong lahirnya UU No.22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah. Menurut (Suhartono, 2015), Otonomi daerah mendorong kebijakan desentralisasi yang merupakan anti tesis sentralisasi yang telah menyebabkan ketimpangan pendapatan antar wilayah. Maknanya, desentralisasi bertujuan untuk mengurangi ketimpangan pendapatan antar wilayah.

Oleh karena itu, dalam Peraturan Daerah Provinsi Banten No. 4 Tahun 2012, salah satu fokus pembangunan yang diprioritaskan oleh Pemerintah Provinsi Banten yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah pemantapan kualitas pertumbuhan dan pemerataan ekonomi. Pemantapan kualitas pertumbuhan dan pemerataan ekonomi ini bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi Provinsi Banten yakni pertumbuhan dan ketimpangan pendapatan antar wilayah.

Dengan diterapkannya desentralisasi di Provinsi Banten dan RPJMD dengan fokus pemantapan kualitas pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, diharapkan pertumbuhan ekonomi semakin baik/meningkat dan kesenjangan pendapatan semakin menurun. Oleh karena itu, penulisan ini bertujuan mengetahui pertumbuhan ekonomi dan kesenjangan pendapatan antar wilayah di Provinsi Banten pada Tahun 2010-2016.

METODE

Data yang digunakan dalam penelitian bersumber dari data PDRB per kapita dan pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Banten 2010-2016, Provinsi Banten Dalam Angka 2016, Kabupaten Lebak Dalam Angka 2013, Kabupaten Pandeglang Dalam Angka 2013.

Metode yang digunakan untuk menganalisis data di atas adalah sebagai berikut:

Tipologi Klassen

Menurut Kuncoro (2013), tipologi Klassen digunakan untuk mengklasifikasi daerah ke dalam empat kuadran berdasarkan dua indikator ekonomi, yakni PDRB per kapita dan laju pertumbuhan ekonomi. Empat kuadran tersebut seperti terlihat pada Tabel 1 di bawah ini.

Tabel 1. Klasifikasi Wilayah Menurut Tipologi Klassen

<div style="text-align: center;"> PDRB per kapita (y) Pertumbuhan Ekonomi (r) </div>	$y_i > y$	$y_i < y$
	$r_i > r$	$r_i < r$
	Daerah cepat maju dan cepat tumbuh	Daerah berkembang cepat
	Daerah maju tapi lamban tumbuh (tertekan)	Daerah relatif tertinggal

Keterangan: r_i : laju pertumbuhan ekonomi wilayah i ; r : laju pertumbuhan ekonomi wilayah referensi y_i : PDRB per kapita wilayah i ; y : PDRB per kapita wilayah referensi

Sumber: Kuncoro, M (2013).

Indeks Entropi Theil

Indeks entropi Theil merupakan salah satu metode untuk mengukur ketimpangan pendapatan suatu wilayah yang sebenarnya merupakan konsep teori informasi. Kelebihan indeks Entropi Theil dibandingkan indeks-indeks lain yang hanya menghasilkan satu nilai tunggal adalah indeks entropi Theil dapat melihat ketimpangan di dalam wilayah (within) dan antar wilayah (between). Menurut Ying dalam Kuncoro (2004:134) rumus indeks entropi Theil sebagai berikut:

$$I(y) = \sum \left(\frac{y_i}{y} \log \left[\frac{\left(\frac{y_i}{y} \right)}{\left(\frac{x_i}{x} \right)} \right] \right) \dots\dots\dots (1)$$

Di mana: $I(y)$: Indeks entropi Theil

y_i : PDRB per kapita wilayah i
 y : PDRB per kapita wilayah referensi
 x_i : jumlah penduduk wilayah i
 x : jumlah penduduk provinsi

Indeks Williamson

Salah satu ukuran ketimpangan pendapatan antar wilayah yang mudah dalam penghitungan adalah indeks Williamson karena indeks ini sebenarnya modifikasi dari formula varians dengan penimbang tertentu. Menurut (Kuncoro, 2004) rumus indeks Williamson sebagai berikut:

$$IW = \frac{\sqrt{\sum (Y_i - Y)^2 (f_i/n)}}{Y} \dots\dots\dots (2)$$

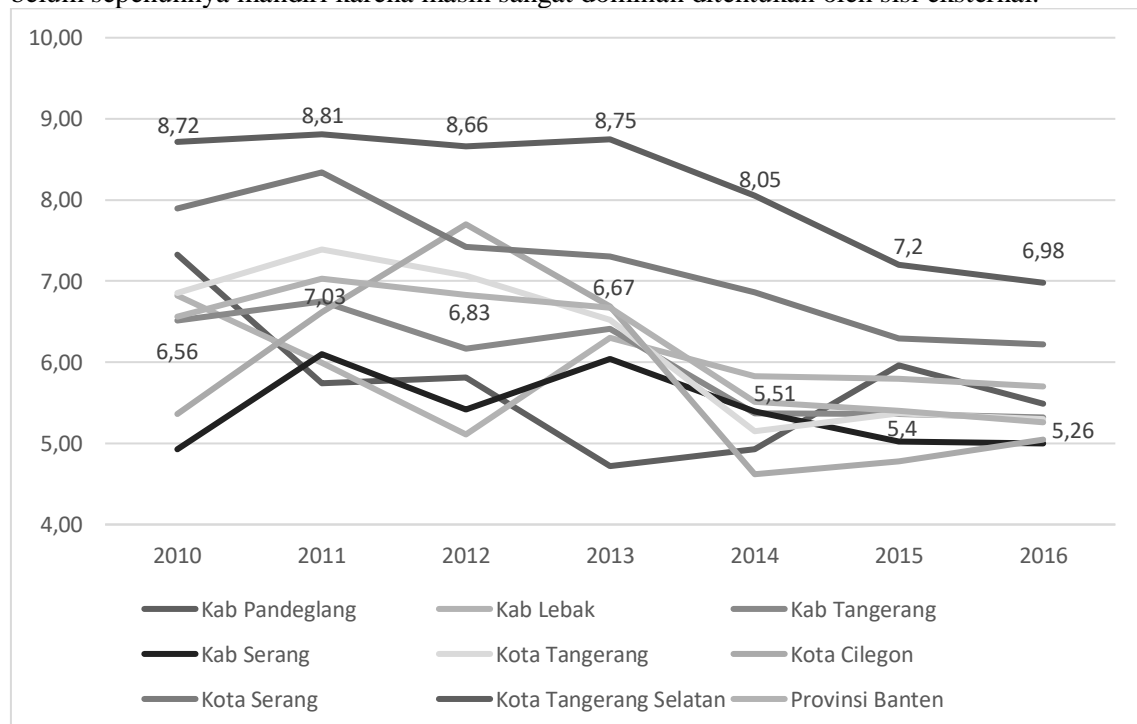
Di mana:

IW : Indeks Williamson
 Y_i : PDRB perkapita di Kabupaten/Kota i
 Y : PDRB perkapita di Provinsi Banten
 f_i : Jumlah penduduk di Kabupaten/Kota i
 n : Jumlah penduduk di Provinsi Banten

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Banten dan semua kabupaten/kota di provinsi Banten (Gambar 1) cenderung menurun selama periode 2010-2016. pertumbuhan ekonomi Provinsi Banten sebesar 6,56 persen pada Tahun 2010 menjadi 5,26 persen pada Tahun 2016. Menurut (BPS Provinsi Banten, 2017) Pertumbuhan ekonomi yang melambat disebabkan kondisi ekonomi global yang belum pasti dan pemotongan anggaran Pemerintah Pusat. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Banten belum sepenuhnya mandiri karena masih sangat sangat dominan ditentukan oleh sisi eksternal.

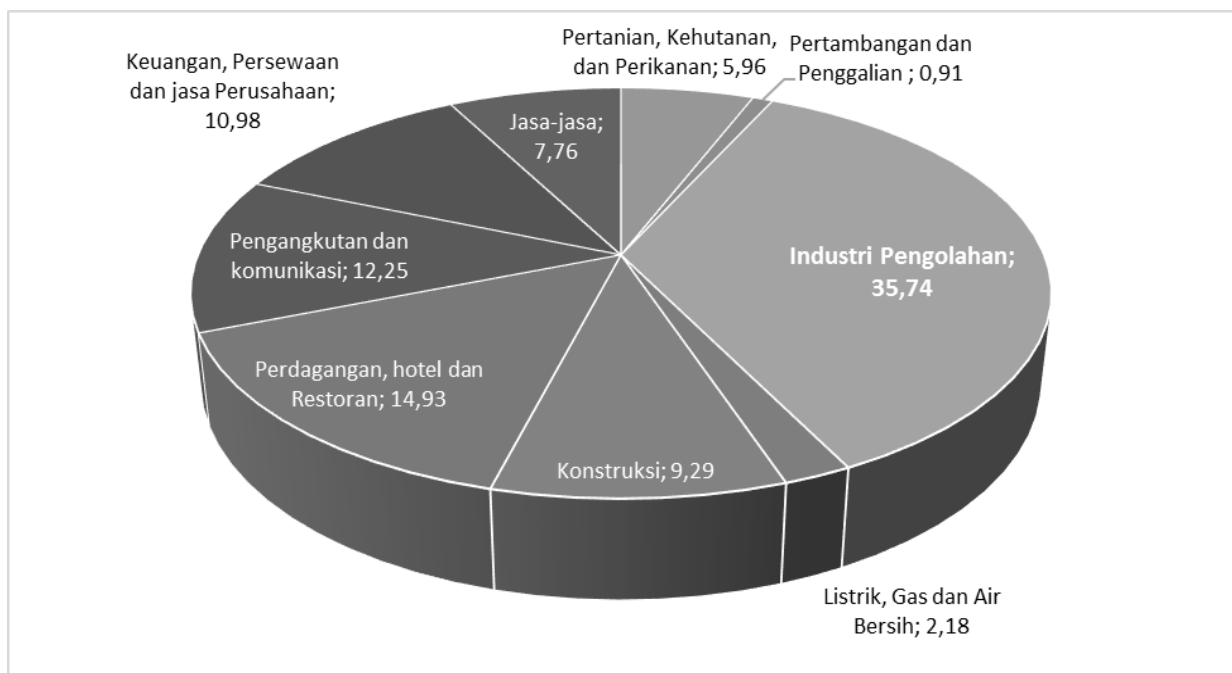


Gambar 1. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Selama Periode Tahun 2010-2016.

Sumber: BPS Provinsi Banten, beberapa tahun (diolah).

Dampak dari kondisi ekonomi global yang belum stabil terlihat dari struktur ekonomi Provinsi Banten selama Tahun 2010-2016 (Gambar 2). Selama periode 2010-2016 perekonomian Provinsi Banten ditopang oleh 3 sektor, yakni sektor Industri pengolahan sebesar 35,74 persen; sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 14,93 persen dan sektor pengangkutan dan komunikasi sebesar 12,25 persen. Ketika ketiga sektor yang menopang perekonomian Provinsi Banten bermasalah, maka perekonomian Provinsi Banten akan terpengaruh.

Menurut (BPS Provinsi Banten, 2017) ketiga sektor ekonomi di atas, yakni sektor industri pengolahan, sektor perdagangan, hotel dan restoran dan sektor pengangkutan dan komunikasi disebut dengan lapangan usaha/sector ekonomi yang bermasalah. Lapangan usaha yang bermasalah yaitu lapangan usaha yang mengalami perlambatan pertumbuhan dan atau tumbuh di bawah rata-rata pertumbuhan sektoral akan berdampak melambatkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Banten.



Gambar 2. Rata-rata Kontribusi Lapangan Usaha Terhadap PDRB Provinsi Banten Periode Tahun 2010-2016.

Sumber: BPS Provinsi Banten, beberapa tahun (diolah).

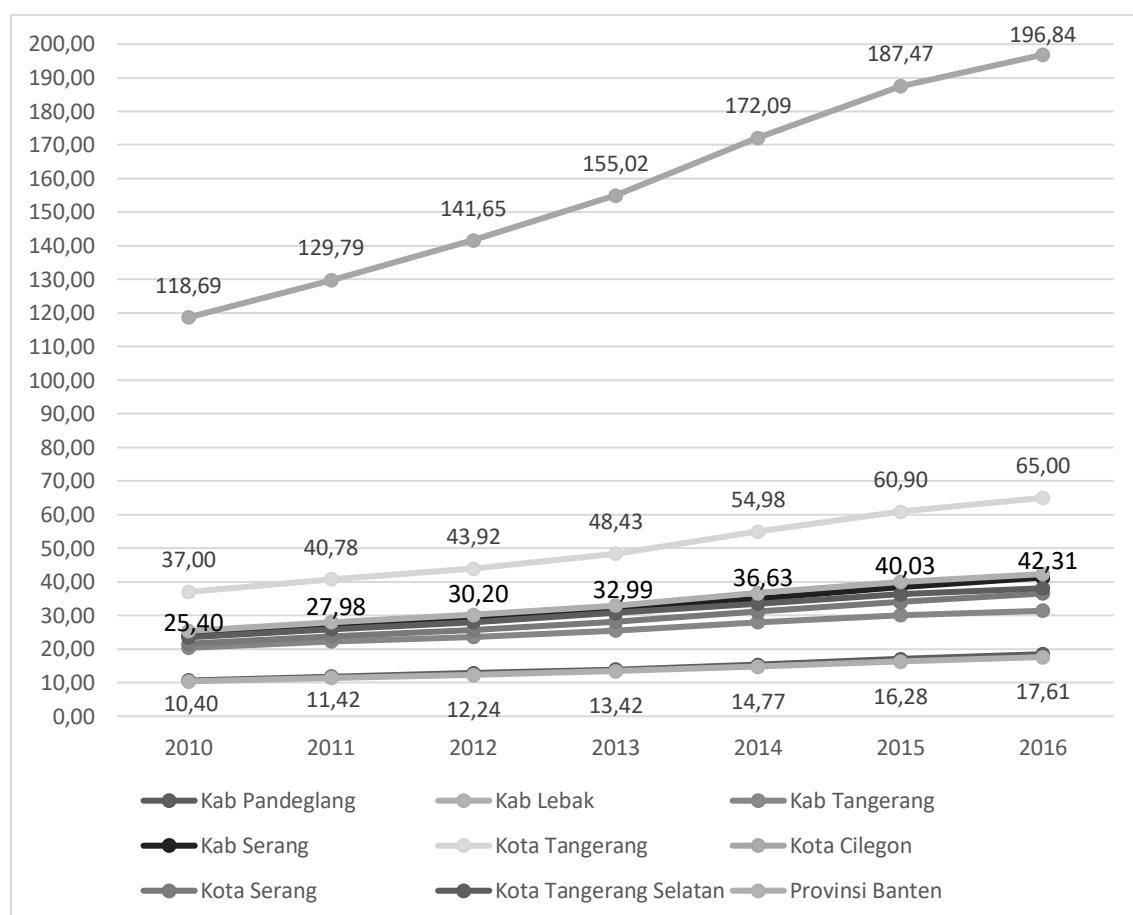
Melambatnya perekonomian Provinsi Banten juga berdampak kepada perekonomian seluruh kabupaten/kota yang secara administratif berada di bawahnya (Gambar 1). Secara umum, pertumbuhan ekonomi seluruh kabupaten/kota mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi, kecuali Kabupaten Serang. Kabupaten Serang cenderung meningkat dari pertumbuhan ekonomi sebesar 4,93 persen pada Tahun 2010 menjadi 5,00 persen pada Tahun 2016

Pertumbuhan ekonomi kota Tangerang Selatan yang paling tinggi selama periode Tahun 2010-2016 juga mengalami perlambatan dari 8,72 persen pada Tahun 2010 menjadi 6,98 persen pada Tahun 2016. Kota Cilegon yang merupakan pusat industri di Provinsi Banten mengalami perlambatan ekonomi dari 5,36 persen (2010) menjadi 5,05 persen (2016).

Walaupun pertumbuhan ekonomi Provinsi Banten mengalami perlambatan, namun PDRB per kapita Provinsi Banten selama periode Tahun 2010-2016 cenderung meningkat sebesar 66,59 persen. Seluruh kabupaten/kota di Provinsi Banten juga mengalami peningkatan PDRB/kapita di atas 50 persen selama periode tersebut. Kota Tangerang mengalami peningkatan PDRB/kapita tertinggi, yakni sebesar 75,65 persen. Peningkatan PDRB/kapita terendah dimiliki Kabupaten Tangerang.

Namun, bila kita lihat lebih mendalam, terlihat ada ketimpangan pendapatan yang mencolok antar kabupaten/kota, yakni Kota Cilegon memiliki rata-rata PDRB per kapita tertinggi atau 12 kali lipat dari rata-rata PDRB per kapita kabupaten Lebak. PDRB per kapita Kota Cilegon pada Tahun 2010 sebesar Rp. 118, 69 juta rupiah dibandingkan dengan PDRB per kapita Kabupaten Lebak sekitar

Rp. 10,40 juta rupiah. Pada tahun 2016, perbandingan PDRB per kapita Kota Cilegon dan Kabupaten Lebak adalah Rp. Rp. 196,84 juta rupiah dengan Rp. 17,61 juta rupiah.



Gambar 3. PDRB per kapita Provinsi Banten Periode Tahun 2010-2016.

Sumber: BPS Provinsi Banten, beberapa tahun (diolah).

Tabel 2. Rata-rata PDRB per kapita dan Rata-rata Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Banten

Tahun 2010-2016

No.	Kabupaten/Kota	Rata-rata PDRB/Kapita (juta)	Rata-rata Pertumbuhan Ekonomi
1.	Kabupaten Pandeglang	14,29	5,71
2.	Kabupaten Lebak	13,73	5,94
3.	Kabupaten Tangerang	25,90	5,98
4.	Kabupaten Serang	32,37	5,41
5.	Kota Tangerang	50,15	6,24
6.	Kota Cilegon	157,37	5,83
7.	Kota Serang	28,70	7,19
8.	Kota Tangerang Selatan	30,87	8,17
	Banten	33,65	6,18

Sumber: BPS Provinsi Banten, beberapa tahun (diolah).

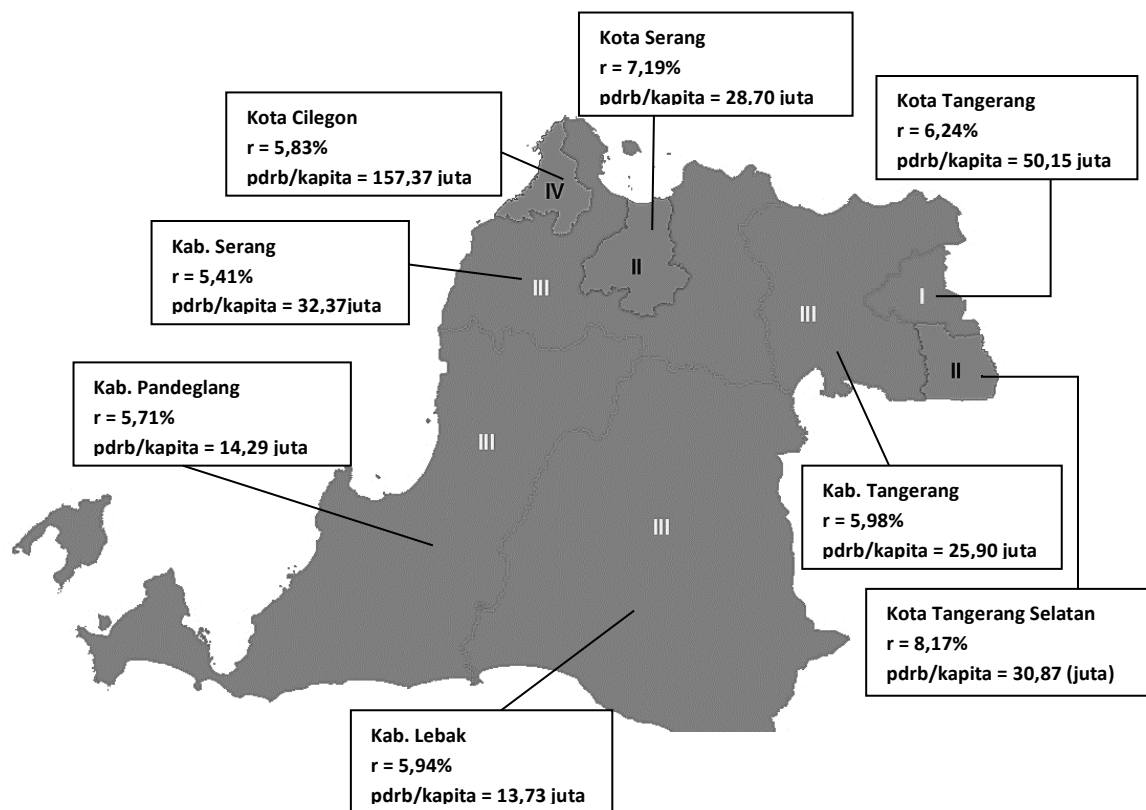
Dari kedua indikator ekonomi di atas, yakni rata-rata PDRB per kapita dan rata-rata pertumbuhan ekonomi di Provinsi Banten selama periode Tahun 2010-2016 (Tabel 2), dapat dianalisis dengan menggunakan tipologi Klassen. Dari Gambar 1, peta tipologi Klassen kabupaten/kota di

Provinsi Banten diperoleh gambaran bahwa seluruh kabupaten (Kabupaten Pandeglang, Lebak, Serang dan Tangerang) di Provinsi Banten diklasifikasikan di kuadran III (berwarna merah) yang berarti semua kabupaten dikategorikan sebagai daerah yang relatif tertinggal.

Sedangkan Kota Cilegon (warna kuning) diklasifikasikan ke dalam daerah maju tapi tertekan. Kota Tangerang (warna biru) termasuk dalam klasifikasi daerah cepat maju dan cepat tumbuh. Dua kota lainnya, yakni Kota Serang dan Kota Tangerang Selatan (warna hijau) termasuk ke dalam daerah berkembang cepat. Dari keempat klasifikasi Klassen di atas menunjukkan bahwa pemerintah daerah Provinsi Banten mengkonsentrasikan pembangunan ekonominya pada kota-kota yang mengakibatkan terjadinya ketimpangan pendapatan antar daerah di Provinsi Banten.

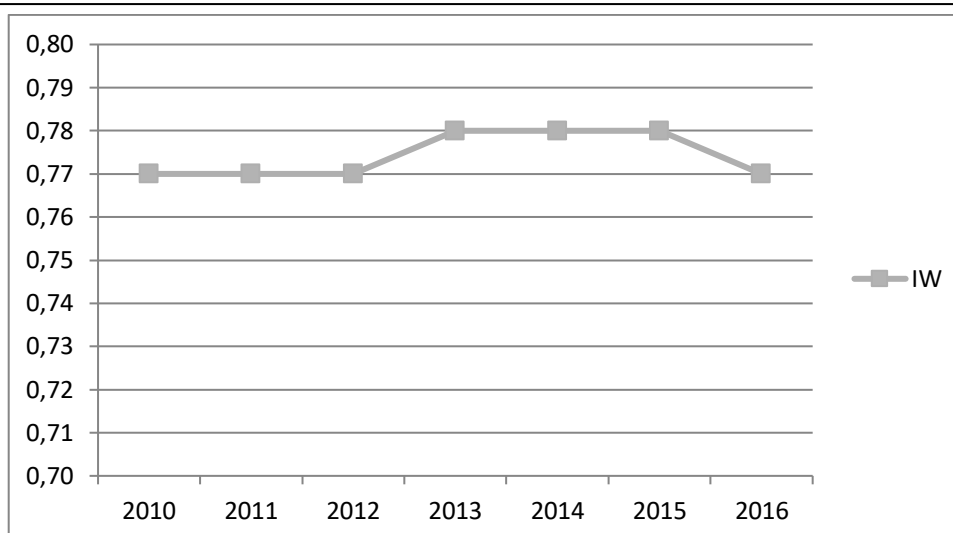
Kesejangan Pendapatan

Ketimpangan pendapatan antar wilayah di Provinsi Banten tinggi yang ditunjukkan dengan nilai indeks Wiliamson sekitar 0,77 selama periode 2010-2016. Nilai indeks Wiliamson Tahun 2010-2012 sebesar 0,77. Ketimpangan pendapatan di wilayah Banten meningkat dari Tahun 2012 sebesar 0,77 menjadi 0,78 pada Tahun 2013. Selama Tahun 2013-2015 nilai indeks Wiliamson tetap bertahan sebesar 0,78. Dan menurun 0,01 point dari Tahun 2015 sebesar 0,78 menjadi 0,77 pada Tahun 2016.



Gambar 4. Tipologi Klassen Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2010-2016.

Sumber: BPS Provinsi Banten, beberapa tahun (diolah).



Gambar 5. Indeks Wiliamson Provinsi Banten Periode Tahun 2010-2016.

Sumber: BPS Provinsi Banten, beberapa tahun (diolah).

Tabel 3. Indeks Theil Provinsi Banten Tahun 2010-2016

Tahun	Tw	Tb	T
2010	0,30	12,01	12,32
2011	0,30	11,96	12,26
2012	0,31	12,02	12,33
2013	0,32	12,04	12,36
2014	0,32	12,03	12,35
2015	0,32	12,02	12,34
2016	0,32	12,02	12,34

Sumber: BPS Provinsi Banten, beberapa tahun (diolah).

Untuk melihat penyebab ketimpangan pendapatan antar wilayah di Provinsi Banten, apakah disebabkan di dalam wilayah (Tw) atau antar wilayah (Tb) digunakan indeks Theil. Dari Tabel 3 terlihat bahwa ketimpangan pendapatan di dalam wilayah (Tw) pada periode 2010-2016 berkisar pada nilai 0,3. Sedangkan ketimpangan pendapatan antar wilayah (Tb) di Provinsi Banten selama periode tahun 2010-2016 berkisar 12,32. Hal ini bermakna bahwa penyebab ketimpangan pendapatan di Provinsi Banten adalah ketimpangan pendapatan antar Kabupaten/Kota.

Berdasarkan klasifikasi antara tipologi klassen (gambar 3) dan indeks entropi theil (IET) di Provinsi Banten tahun 2010-2016 (Tabel 3) diperoleh klasifikasi tipologi Klassen menurut indeks entropy Theil (Tabel 5). Dari Tabel 5, terlihat bahwa di daerah cepat maju dan cepat tumbuh (Kota Tangerang) dan daerah maju tapi lamban tumbuh (Kota Cilegon) memiliki tingkat ketimpangan tinggi (IET>1). Sedangkan daerah cepat berkembang (Kota Serang dan Kota Tangerang Selatan) dan daerah relatif tertinggal (Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Tangerang, dan Kabupaten Serang) memiliki ketimpangan yang kecil (IET<1).

Tabel 4. Indeks Theil Kabupaten/Kota di Provinsi Banten, Tahun 2010-2016

No	Kabupaten/Kota	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Rata-rata
1	Kabupaten Pandeglang	0.25	0.25	0.26	0.26	0.26	0.27	0.28	0.26
2	Kabupaten Lebak	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.24	0.25	0.23
3	Kabupaten Tangerang	0.38	0.37	0.36	0.35	0.33	0.32	0.31	0.35
4	Kabupaten Serang	0.81	0.83	0.85	0.84	0.85	0.86	0.88	0.85
5	Kota Tangerang	1.36	1.36	1.36	1.37	1.42	1.44	1.46	1.40
6	Kota Cilegon	9.92	9.84	9.98	10.01	10.02	9.99	9.92	9.95
7	Kota Serang	1.02	1.02	1.01	1.03	1.02	1.02	1.04	1.02
8	Kota Tangerang Selatan	0.82	0.81	0.81	0.81	0.78	0.77	0.75	0.79

Sumber: PDRB Provinsi Banten Menurut Lapangan Usaha (diolah).

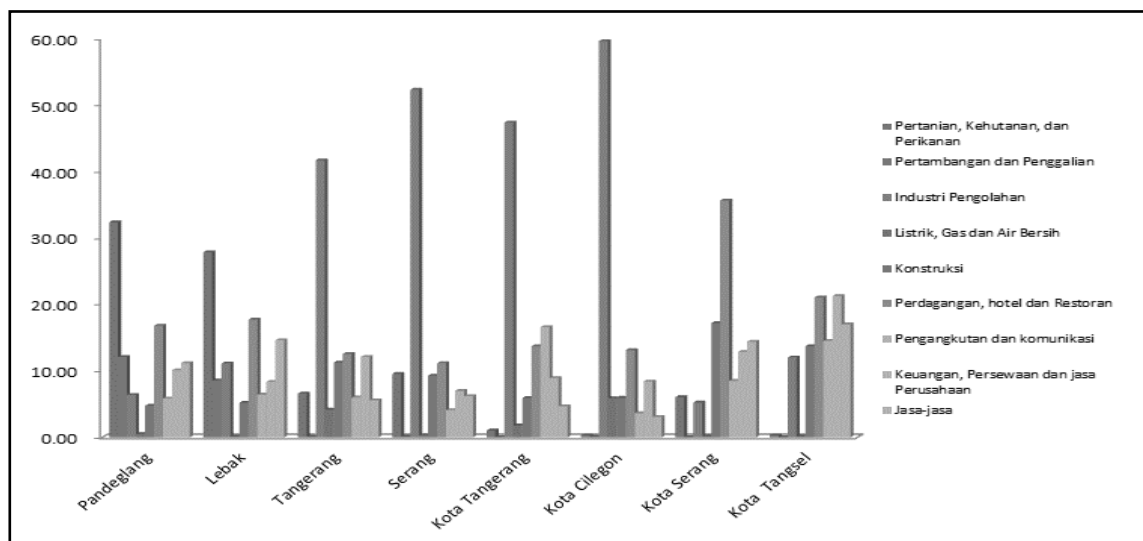
Tabel 5. Klasifikasi Kabupaten/Kota menurut Tipologi Klassen dan Indeks Entropy Theil

Provinsi Banten Tahun 2010-2016		
Tipologi Klassen	Indeks Entropy Theil	
	IET < 1	IET > 1
Daerah cepat maju dan cepat tumbuh		Kota Tangerang
Daerah maju tapi lamban tumbuh		Kota Cilegon
Daerah berkembang cepat		Kota Serang
	Kota Tangerang Selatan	
	Kabupaten Pandeglang	
Daerah relatif tertinggal	Kabupaten lebak	
	Kabupaten Tangerang	
	Kabupaten Serang	

Sumber: PDRB Provinsi Banten menurut Lapangan Usaha (diolah)

Menurut (Suhartono, 2015) yang menggunakan data tahun 2007-2011 menyatakan bahwa penyebab ketimpangan yang terjadi pada Kota Cilegon dan Kota Tangerang adalah struktur ekonomi kedua kota ini. Namun pada penelitian ini, struktur ekonomi bukan penyebab ketimpangan pendapatan antarwilayah di Provinsi Banten. Hal ini ditunjukkan dengan struktur ekonomi seluruh kabupaten/kota di Provinsi Banten pada Gambar 5 di bawah ini.

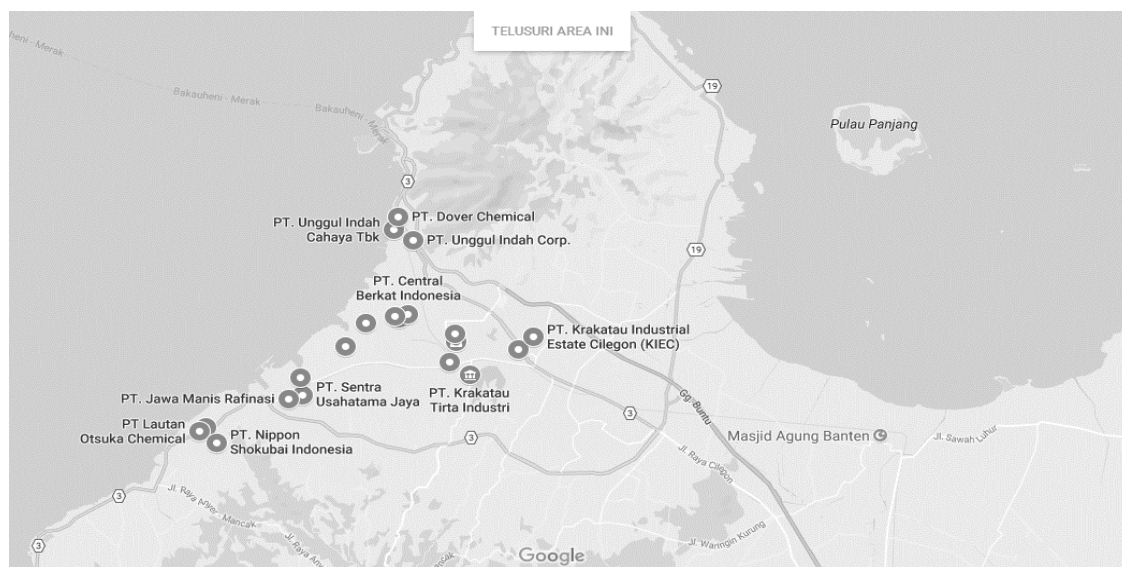
Dari Gambar 5 di atas, terlihat bahwa struktur ekonomi bukanlah penyebab dari ketimpangan pendapatan di suatu kabupaten/kota karena struktur ekonomi Kabupaten Tangerang dan Kabupaten Serang juga didominasi oleh lapangan usaha industri pengolahan. Ketimpangan pendapatan di Kota Cilegon dan Kota Tangerang disebabkan oleh PDRB per kapita yang tinggi di mana PDRB per kapita tersebut merupakan dampak produksi barang dan jasa yang sangat tinggi dari perusahaan-perusahaan yang berada di kedua kota tersebut.



Gambar 6. Struktur Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Selama Periode Tahun 2010-2016

Sumber: PDRB Provinsi Banten Tahun 2010-2016

Perusahaan-perusahaan atau pabrik-pabrik di Kota Cilegon dan Kota Tangerang dimiliki oleh perusahaan asing (PMA). Penelitian yang dilakukan (Dhyatmika, 2013) dengan menggunakan model regresi dengan model fixed effect menyimpulkan bahwa penanaman modal asing (PMA) berpengaruh positif terhadap ketimpangan pembangunan di kedua kota tersebut. Fakta di atas didukung oleh Gambar 6 dan Tabel 5 yang menjelaskan bahwa pabrik-pabrik yang berdomisili di Kota Cilegon dan Kota Tangerang adalah milik perusahaan asing.



Gambar 7. Beberapa Perusahaan yang berlokasi di Kota Cilegon

Sumber: <https://www.google.co.id/maps/>.

Tabel 6. Jumlah dan persentase perusahaan industri menengah/besar menurut persentase permodalan terbesar di kota cilegon tahun 2013-2015

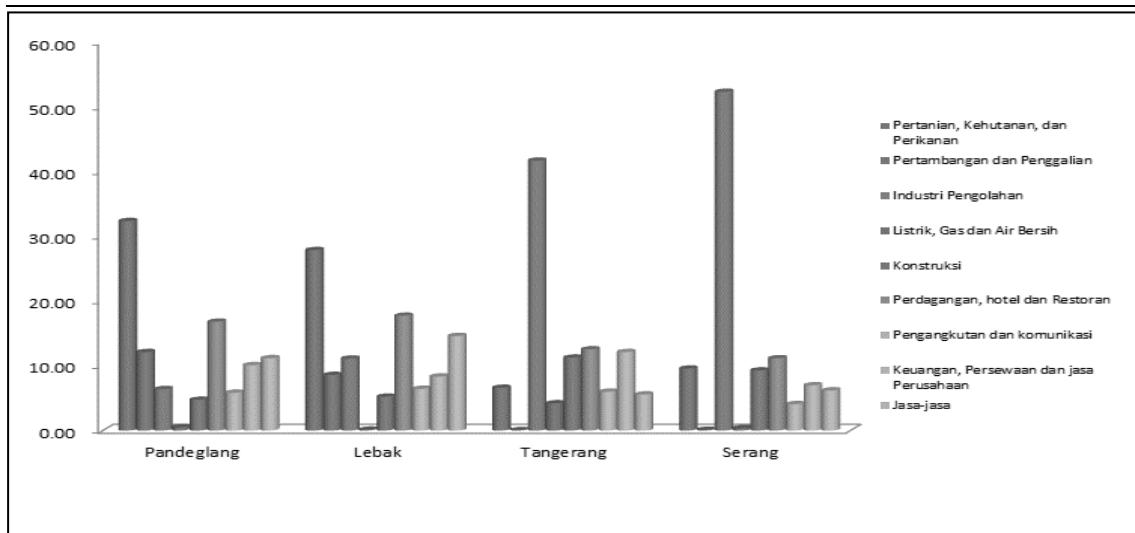
Persentase Permodalan	2013		2014	
	Jumlah Perusahaan	Persentase (%)	Jumlah Perusahaan	Persentase (%)
Pemerintah Pusat	3	4,11	4	5,48
Pemerintah Daerah	-	-	-	-
Swasta Nasional	34	46,58	32	43,84
PMA	36	49,32	37	50,68
Jumlah	73	100,00	73	100,00

Sumber: BPS Kota Cilegon.

Dampaknya barang dan jasa yang dihasilkan di kedua kota tersebut diekspor ke luar Kota Cilegon dan Kota Tangerang sehingga uang tidak tersebar secara merata. Selain itu, menurut (Setyobudi, 2011) pembangunan di Cilegon tidak dibarengi peningkatan kualitas sumber daya manusia di wilayah Cilegon, sehingga perusahaan-perusahaan mempekerjakan para manajer ke atas dari luar provinsi Banten atau Kota Cilegon. Pernyataan tersebut juga didukung oleh penelitian (Yuliadi, 2012) bahwa kebijakan pemekaran wilayah di Indonesia tidak didukung oleh penyediaan insfrakstuktur dan peningkatan kualitas SDM di wilayah pemekaran tersebut.

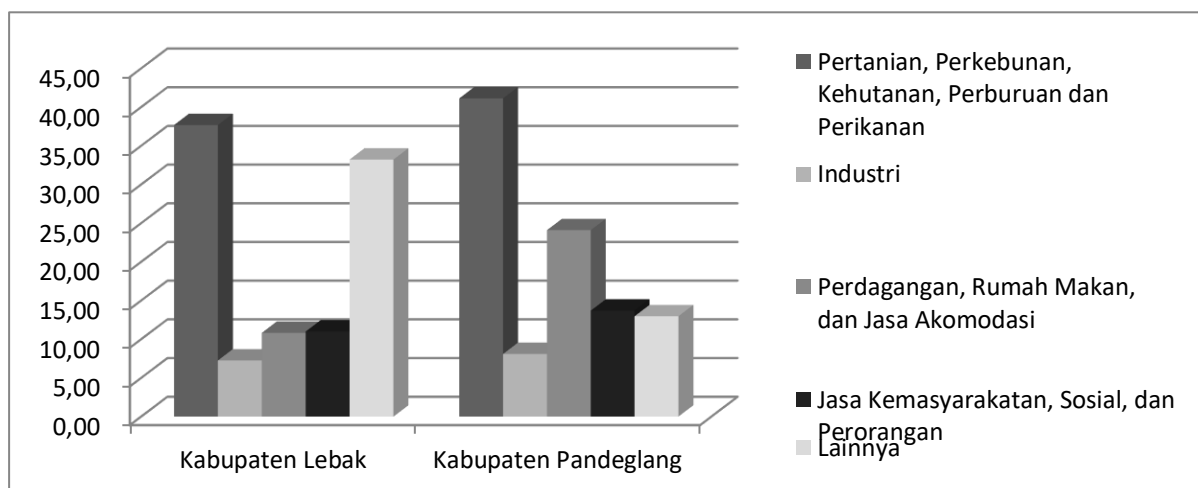
Daerah yang masuk kategori relatif tertinggal yakni seluruh kabupaten di Provinsi Banten. Seluruh kabupaten di provinsi Banten memiliki ketimpangan pendapatan yang rendah. Walaupun ketimpangannya rendah, namun struktur ekonomi keempat kabupaten dapat dikategorikan menjadi dua, wilayah yang struktur ekonominya ditopang oleh sektor pertanian (Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak) dan wilayah yang ditopang oleh sektor industri pengolahan (Kabupaten Tangerang dan Kabupaten Serang), seperti yang terlihat pada Gambar 7.

Pada Gambar 8 terlihat bahwa wilayah yang ditopang oleh sektor pertanian yakni Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak terletak di wilayah bagian selatan provinsi Banten. Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak memiliki struktur ekonomi, di mana masing-masing sektor pertanian berkontribusi sebesar 32,35 persen dan 27,87 persen. Hal ini menunjukkan penduduk Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak mengandalkan hidupnya dari sektor pertanian.



Gambar 8. Struktur Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Selama Periode Tahun 2010-2016

Sumber: PDRB Provinsi Banten Tahun 2010-2015



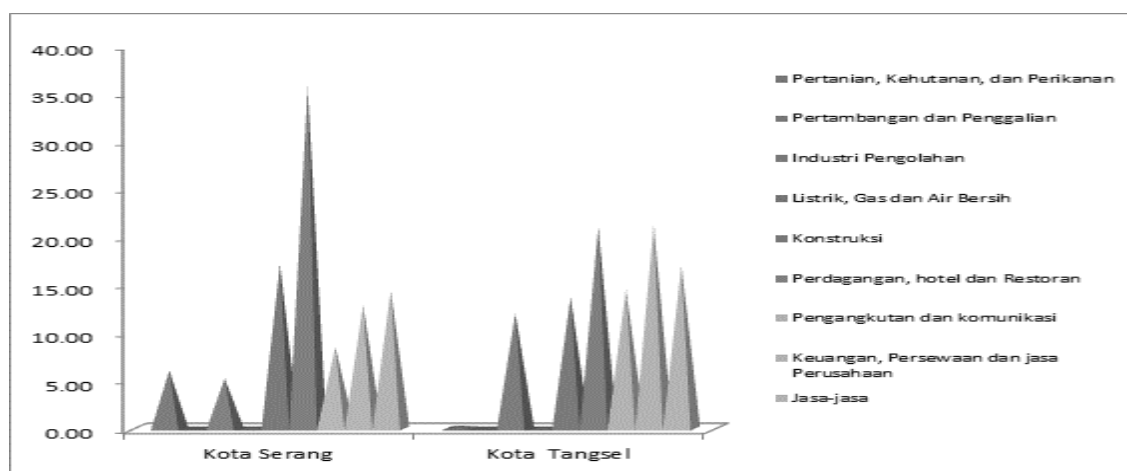
Gambar 9. Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas yang Bekerja menurut Lapangan Utama Tahun 2013

Sumber: BPS Kabupaten Lebak dan BPS Kabupaten Pandeglang

Sedangkan Kabupaten Tangerang dan Kabupaten Serang memiliki struktur ekonomi yang didominasi oleh lapangan usaha industri. Kontribusi lapangan usaha industri sebesar 41,69 persen di Kabupaten Tangerang disebabkan wilayah Kabupaten Tangerang merupakan wilayah Banten utara yang menjadi salah satu tujuan utama migrasi di Indonesia sebagai akibat menjadi daerah hinterland bagi Provinsi DKI Jakarta. Adapun peran lapangan usaha industri sebesar 52,31 persen di Kabupaten Serang disebabkan oleh kabupaten tersebut berdekatan dengan Kota Cilegon dan Kota Serang.

Daerah-daerah berkembang cepat (Kota Serang dan Kota Tangerang Selatan) memiliki ketimpangan yang rendah. Hal ini disebabkan kedua kota tersebut baru berdiri yakni Kota Serang pada tahun 2007 dan Kota Tangerang Selatan pada tahun 2008 sehingga pembangunan ekonomi baru berjalan selama 8 tahunan. Dari struktur ekonominya, kedua kota yang berkembang cepat ini didominasi oleh sektor tersier.

Pada Gambar 9 dapat dilihat bahwa struktur ekonomi Kota Serang didominasi oleh lapangan usaha perdagangan, hotel dan restoran dan lapangan usaha konstruksi. Masing-masing lapangan usaha tersebut berperan dalam perkeonomian sebesar 35,62 persen dan 17,18 persen. Sedangkan struktur ekonomi Kota Tangerang ditopang oleh lapangan usaha perdagangan, hotel dan restoran dan lapangan usaha keuangan, persewaan dan jasa perusahaan.



Gambar 10. Struktur Ekonomi Kota Serang dan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten Selama Periode Tahun 2010-2015

Sumber: PDRB Provinsi Banten Menurut Lapangan Usaha Tahun 2010-2015

Lapangan usaha perdagangan, hotel dan restoran dan lapangan usaha keuangan, persewaan dan jasa perusahaan memiliki peran yang sangat penting dalam kinerja pembangunan ekonomi Kota Tangerang Selatan yang masing-masing sebesar 21,06 persen dan 21,25 persen. Perkembangan pesat Kota Tangerang Selatan ini disebabkan oleh berbatasan dengan Provinsi DKI Jakarta, terutama Jakarta Selatan. Bahkan, penduduk di Kota Tangerang Selatan yang berbatasan dengan Kota Jakarta Selatan merasa mengaku sebagai warga Kota Jakarta Selatan.

SIMPULAN

Desentralisasi yang bertujuan memperkecil ketimpangan pendapatan antarwilayah karena mendekatkan pemerintah kepada rakyat, belum terjadi di Provinsi Banten karena ketimpangan pendapatan di Banten sangat tinggi dan cenderung meningkat selama periode tahun 2010-2015. Kecenderungan meningkatnya ketimpangan pendapatan antar wilayah di Provinsi Banten menunjukkan belum tepatnya pembangunan ekonomi regional di Provinsi Banten dalam hal pemerataan pembangunan ekonomi antar wilayah. Hal ini ditunjukkan dengan pembangunan yang dipusatkan pada daerah perkotaan dengan indikasi bahwa seluruh kabupaten di Provinsi Banten masuk kategori daerah relatif tertinggal.

Hasil penelitian ini menemukan bahwa ketimpangan yang tinggi berada pada Kota Cilegon dan Kota Tangerang bukan disebabkan oleh struktur ekonomi, namun disebabkan oleh pabrik-pabrik yang memproduksi barang dan jasa dimiliki perusahaan asing (PMA) di mana hasilnya di bawa keluar dari kedua kota tersebut sehingga produksi barang dan jasa tidak tersebar merata di kedua kota tersebut. Selain itu juga kurang memadainya SDM lokal yang bekerja pada level manajer ke atas sehingga SDM lokal bekerja pada tingkatan terendah.

Walaupun penelitian ini sudah menemukan faktor-faktor penyebab dari ketimpangan pendapatan di provinsi Banten, namun harus diakui bahwa penelitian ini masih banyak memiliki kelemahan-kelemahan karena ketimpangan pendapatan selain disebabkan oleh pendapatan, dapat juga disebabkan oleh aspek-aspek lain seperti dari sisi politik, sosial serta budaya masyarakat di wilayah tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Bappenas. (2015). Seri analisis pembangunan wilayah Provinsi Banten 2015. Jakarta: Bappenas.
- Bappenas dan UNDP. (2008). Studi Evaluasi Dampak Pemekaran Daerah 2001-2007. Jakarta: Bappenas
- BPS Provinsi Banten, (2016). Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Banten Menurut Lapangan Usaha 2011-2015. Banten: BPS Provinsi Banten

-
- BPS Provinsi Banten, (2016). Provinsi Banten Dalam Angka 2016. Banten: BPS Provinsi Banten.
- BPS Kabupaten Lebak, (2013). Kabupaten Lebak Dalam Angka 2013. Lebak: BPS Kabupaten Lebak.
- BPS Kabupaten Pandeglang, (2013). Kabupaten Pandeglang Dalam Angka 2013. Lebak: BPS Kabupaten Pandeglang.
- BPS Kota Cilegon, (2016). Statistik Industri Besar Sedang Kota Cilegon Tahun 2014. Cilegon: BPS Kota Cilegon
- Kuncoro, M (2004). Otonomi dan pembangunan daerah reformasi, perencanaan, strategi dan peluang. Jakarta: Erlangga.
- Kuncoro, M (2013). Mudah memahami dan menganalisis indikator ekonomi. Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Fadilah, D. R. (2013). Hukum administrasi negara, desentralisasi dan dekonsentrasi. Jakarta: UI.
- Dhyatmika, K dan Atmanti, HD. (2013). Analisis ketimpangan pembangunan Provinsi Banten Pasca pemekaran. *Diponegoro Journal of economics*, 2 (2), 7.
- Endarto. (2014). Evaluasi pemekaran daerah di era reformasi. *Jurnal Lingkar Widyaiswara*, 1(4), 65.
- Ermalina, A. R. (2015). Tingkat ketimpangan dan desentralisasi fiskal Provinsi Banten. *Jurnal Ilmiah Gema Ekonomi*, 5 (2), 733.
- Iswanto, D. (2015). Ketimpangan pendapatan antar kabupaten/kota dan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Signifikan*, 4(1), 64.
- Muqoyyidin, A. W. (2013). Pemekaran wilayah dan otonomi daerah pasca reformasi di Indonesia: Konsep, Fakta Empiris dan rekomendasi ke Depan. *Jurnal Konstitusi*, 10 (2), 288.
- Puji Wibowo, A. M. (2008). Mencermati dampak desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. *Jurnal Keuangan Publik*, 5 (1), Hal. 55-83.
- Saputra, A. (2008). Pemekaran daerah dan implikasinya pada pembangunan. *Jurnal Administrasi Publik*, 5, No.1, 81.
- Saputra, B. (2013). Pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. *Jurnal Borneo Administrator*, 108.
- Sasana, H. (2009). Peran desentralisasi fiskal terhadap kinerja ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa tengah. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 10 (1), 120.
- Suhartono. (2015). Ketimpangan dan pembangunan ekonomi kabupaten/kota di daerah hasil pemekaran: Studi kasus di Provinsi Nanten dan Gorontalo. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 6 (1), 34.
- Suryanto. (2016). Kebijakan pemekaran daerah dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. *Jurnal Analisis Kebijakan*, 1(1), 31.
- Umiyati, E. (2012). Analisis tipologi pertumbuhan ekonomi dan disparitas pendapatan dalam implementasi otonomi daerah di Provinsi Jambi. *Jurnal Paradigma Ekonomika*, 1(5), 21.
- Yuliadi, I. (2012). Kesenjangan investasi dan evaluasi kebijakan pemekaran wilayah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 13 (2), 286.
- Zahara, A. (2015). Analisis disparitas pendapatan dan pola pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh Periode 2002-2012. *Jurnal Akuntansi dan Pembangunan*, 147.
- Kemendagri. (2011). Laporan Hasil Evaluasi Daerah Otonom Hasil Pemekaran (EDOHP) 2011. Jakarta: Kemendagri.
- Amir, H. (2013). Ketimpangan antar wilayah melebar atau merapat? Dipetik 11 April 2017, dari <http://kangamir.blogspot.co.id/2013/05/ketimpangan-antar-wilayah-melebar-atau.html>.

Setyobudi, A. (2011). Kesenjangan yang masih membelit. Dipetik 21 Juni 2017, dari <http://www.kompas.com>

Google, (2017). Beberapa perusahaan yang berlokasi di Cilegon. Dipetik 18 Juni 2017, dari <http://www.google.com/maps>